



Jurnal Hubungan Internasional

Vol. 2 No. 2 (September 2025-Februari 2026)

---

## Perlawanan Perempuan Amungme terhadap Kapitalisme Ekstraktif di Mimika Papua Tengah (2023)

*Resistance of Amungme Women Against Extractive Capitalism in Mimika, Central Papua (2023)*

**Putra Agung Pratama**

Universitas Amikom Yogyakarta

[Putraagungpratama23@gmail.com](mailto:Putraagungpratama23@gmail.com)

Diterima 20 Agustus 2025 | Direvisi 4 November 2025 | Diterbitkan 25 Desember 2025

### **ABSTRACT**

*This study examines the resistance of Amungme women against extractive capitalism in Papua through the lens of Critical International Political Economy (IPE). The purpose of this study is to explore how global extractive industries intersect with local gender relations and how Indigenous resistance articulates alternative visions of the global political economy. Using a qualitative approach based on the analysis of documents, NGO reports, and academic literature, this research interprets the dynamics of Amungme women's resistance within a global context marked by capitalism, patriarchy, and coloniality. The findings reveal that the resistance of Amungme women against mining operations is not merely an economic survival strategy but a political intervention that challenges transnational capital structures and state-sanctioned resource exploitation. Their resistance is expressed through efforts to protect ancestral lands, revitalize cultural values, and build advocacy networks that connect local struggles with global solidarities. This study broadens the horizon of IPE scholarship by emphasizing the significance of gender and ecological justice in understanding resistance to extractive capitalism in postcolonial contexts such as Papua.*

**Keywords:** Amungme Women, Critical International Political Economy (IPE), Extractive Capitalism, Gender and Ecological Justice, Postcolonial Studies

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji perlawanan perempuan Amungme terhadap kapitalisme ekstraktif di Papua melalui kerangka Ekonomi Politik Internasional (EPI) Kritis. Tujuan studi ini adalah menelusuri bagaimana industri ekstraktif global berinteraksi dengan relasi gender lokal serta bagaimana praktik perlawanan masyarakat adat membentuk wacana alternatif terhadap tatanan ekonomi politik global. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis analisis dokumen, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan literatur akademik, penelitian ini menafsirkan dinamika perlawanan perempuan Amungme dalam konteks kekuasaan global yang diwarnai oleh kapitalisme, patriarki, dan kolonialitas. Temuan menunjukkan bahwa perlawanan perempuan Amungme terhadap operasi pertambangan tidak hanya merupakan strategi bertahan hidup secara ekonomi, melainkan juga bentuk intervensi politik yang menantang struktur kapital transnasional dan legitimasi negara atas eksloitasi sumber daya alam. Bentuk perlawanan tersebut diwujudkan melalui upaya melindungi tanah leluhur, menghidupkan

kembali nilai-nilai budaya, serta membangun jaringan advokasi yang menghubungkan perjuangan lokal dengan solidaritas global. Penelitian ini memperluas cakrawala kajian EPI dengan menegaskan pentingnya dimensi gender dan keadilan ekologis dalam memahami resistensi terhadap kapitalisme ekstraktif di konteks pascakolonial seperti Papua.

**Kata kunci:** Ekonomi Politik Internasional (EPI) Kritis, Gender dan Keadilan Ekologis, Kapitalisme Ekstraktif, Perempuan Amungme, Pascakolonial Papua

## PENDAHULUAN

Tanah Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah termasuk cadangan emas, tembaga, dan hutan tropis terbesar di Asia Tenggara telah lama menjadi pusat eksloitasi dalam sistem kapitalisme global. Dominasi korporasi multinasional seperti Freeport-McMoRan (AS) dan investor Tiongkok dalam proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) mencerminkan ketergantungan Indonesia pada model pembangunan ekstraktif, yang justru memperdalam ketimpangan global (Pecamuya, 2025). Dalam perspektif Hubungan Internasional, Papua menjadi contoh nyata bagaimana "kutukan sumber daya" (*resource curse*) berkelindan dengan kepentingan geopolitik, di mana kekayaan alam justru memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Perempuan Amungme, sebagai salah satu komunitas adat yang paling terdampak, menghadapi konsekuensi multidimensional dari kapitalisme ekstraktif. Proyek-proyek seperti tambang Grasberg dan ekspansi perkebunan sawit MIFEE telah mengakibatkan dislokasi sosial masif, di mana masyarakat adat kehilangan tanah ulayat sumber penghidupan sekaligus identitas budaya tanpa proses *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Data Yayasan Pusaka (2023) menunjukkan bahwa 1,2 juta hektar tanah adat di Papua telah beralih ke korporasi sejak tahun 2000. Negara hadir bukan sebagai pelindung, melainkan melalui militerisasi (seperti pembentukan Kodim baru di Intan Jaya) untuk mengamankan kepentingan investasi (Yansyah et al., 2022).

Bagi perempuan Amungme, dampaknya lebih kompleks. Laporan Komnas Perempuan (2023) mengungkap bahwa 67% perempuan di wilayah tambang mengalami kekerasan ekonomi, dipaksa bekerja dengan upah rendah di perkebunan sawit sebagai pengganti kebun tradisional. Selain itu, mereka menghadapi kekerasan seksual oleh aparat (seperti kasus Paniai 2022) dan stigmatisasi sebagai "penghambat pembangunan". Kekerasan ini bersifat struktural, didukung oleh kebijakan nasional seperti UU Cipta Kerja yang mempermudah izin proyek ekstraktif, sementara mekanisme HAM internasional yang mengikat untuk korporasi tetap lemah.

Meskipun instrumen seperti *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP, 2007) dan Konvensi CEDAW menjamin hak masyarakat adat dan perempuan, implementasinya terhambat oleh asimetri kekuasaan global. Bank Dunia, misalnya, mendanai proyek infrastruktur pendukung MIFEE tanpa tuntutan akuntabilitas HAM yang ketat, sementara ASEAN cenderung abai dengan dalih non-intervensi. Ketidakadilan ini semakin nyata ketika upaya hukum seperti gugatan warga Amungme terhadap Freeport di pengadilan AS (2021) kandas karena imunitas korporasi (Chao, 2022).

Namun, di tengah represi, perempuan Amungme tidak pasif. Mereka mengembangkan strategi perlawanan lintas tingkat mulai dari aksi tutup tambang di tingkat lokal (seperti protes perempuan Kamoro di Mimika) hingga membangun aliansi global dengan jaringan seperti Jaringan Perempuan Adat Nusantara (JPAN) dan NGO internasional untuk mengadvokasi isu Papua di forum PBB dan OECD (Kaisupy & Maing, 2021). Perlawanan ini menunjukkan potensi "*boomerang effect*" (Keck & Sikkink, 1998), di mana tekanan internasional dapat menjadi alat untuk memaksa perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini akan menganalisis narasi perlawanan perempuan Amungme terhadap kapitalisme ekstraktif di Papua pada tahun 2023, dengan melihat bagaimana mereka memobilisasi agensi di tengah struktur kekuasaan yang timpang, baik di tingkat lokal maupun global.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode kritis yang berfokus pada pengungkapan relasi kuasa di balik praktik kapitalisme ekstraktif di Papua (Ercan & Vromen, 2023). Pendekatan kritis ini bertujuan untuk menyingkap ketimpangan struktural yang muncul dari interaksi antara negara, korporasi multinasional, dan masyarakat adat, sekaligus memberikan landasan normatif untuk menantang sistem global yang mereproduksi ketidakadilan. Secara khusus, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana kebijakan ekstraktif dan rantai nilai global membentuk mekanisme akumulasi kapital, menelaah peran negara dan korporasi dalam memperkuat dominasi ekonomi-politik, serta mengidentifikasi strategi perlawanan perempuan Amungme sebagai wujud kontra-hegemoni (Adiwinata, 2025).

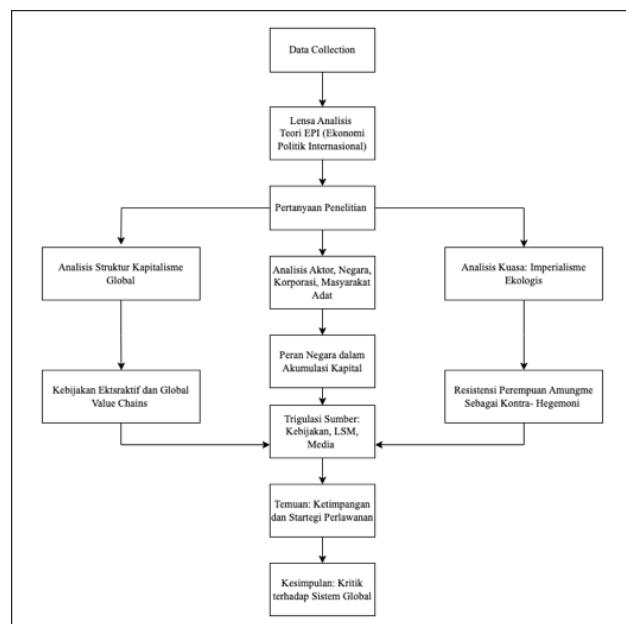
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan-pertanyaan kritis yang difokuskan pada tiga dimensi utama: struktur kapitalisme global, peran aktor-aktor kunci, dan dinamika relasi kuasa. Variabel analitis yang digunakan mencakup kebijakan

ekstraktif, dominasi korporasi, peran negara, imperialisme ekologis, serta strategi perlawanan masyarakat adat. Fokus Analitis & Method ditunjukan pada **Tabel 1.1**.

**Tabel 1.1** Fokus Analitis & Method

Fokus Analisis & Metode		
Fokus Penelitian	Metode	Alat Analisis EPI
1. Akumulasi Kapital Global melalui Eksplorasi SDA	Analisis Wacana Kritis (Fairclough)	- <i>Corporate power</i> dalam kebijakan ekstraktif - <i>Regulatory capture</i> oleh aktor global
2. Dampak Sosial-Ekologis yang Timpang	Analisis Framing	- <i>Externalization of costs</i> (limbah ke masyarakat lokal) - <i>Asimetri informasi</i> dalam narasi korporasi vs. masyarakat
3. Resistensi Perempuan Adat dalam Konteks Global-Lokal	Analisis Narratif & Interseksionalitas	- <i>Agency</i> perempuan vs. <i>structural violence</i> - <i>Transnational advocacy networks</i> (peran NGO internasional)

Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menantang struktur yang melanggengkan ketidakadilan serta menawarkan kerangka kritis bagi perubahan sosial.



**Gambar 1.1** Alur Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan proses pengumpulan data yang komprehensif yang mencakup berbagai sumber primer dan sekunder, seperti dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM), hasil riset akademik, serta pemberitaan media nasional dan internasional. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bahan deskriptif, tetapi juga sebagai dasar untuk menelusuri relasi kekuasaan yang tersembunyi di balik narasi pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi bagaimana wacana pembangunan yang dibingkai dalam logika kapitalisme global justru mereproduksi ketimpangan struktural dan penyingkirkan terhadap masyarakat adat, khususnya perempuan Amungme.

### **Teori Ekonomi Politik Internasional**

Analisis terhadap data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Ekonomi Politik Internasional (EPI), khususnya varian kritis dan feminis, yang berupaya memahami bagaimana kapitalisme global bekerja melalui interaksi antara aktor-aktor utama: negara, korporasi multinasional, dan masyarakat adat. Melalui lensa EPI kritis, penelitian ini menolak pandangan netral terhadap ekonomi global dan justru menyoroti relasi kuasa, proses dominasi, serta mekanisme akumulasi kapital yang berlangsung lintas level dari global hingga lokal. Dalam konteks Papua, hal ini tampak dalam keterlibatan perusahaan tambang multinasional yang beroperasi dengan dukungan kebijakan negara, di mana keduanya berperan sebagai agen kapitalisme ekstraktif yang mengeksplorasi sumber daya dan tenaga kerja lokal.

Ekonomi Politik Internasional (EPI) Kritis merupakan kerangka teoritis yang relevan untuk menganalisis relasi kuasa dalam sistem kapitalisme global, termasuk eksploitasi sumber daya alam di Tanah Papua dan perlawanannya yang dilakukan oleh perempuan Amungme. Berbeda dengan pendekatan liberal yang memandang pasar sebagai entitas netral, EPI Kritis yang berakar pada pemikiran Marxis, teori dependensi, dan pos-strukturalis menyingkap bagaimana struktur ekonomi politik global melanggengkan ketimpangan melalui dominasi aktor-aktor kuat seperti korporasi multinasional, negara maju, dan lembaga keuangan internasional (Badiri, 2020). Teori ini mengkritik peran negara yang sering berfungsi sebagai alat akumulasi kapital, misalnya melalui deregulasi, kebijakan ekstraktif, dan militerisasi, sementara institusi HAM internasional gagal melindungi kelompok marginal, termasuk masyarakat adat dan perempuan.

Dalam konteks Papua, eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi seperti Freeport-McMoRan (AS) dan proyek MIFEE (Tiongkok) mencerminkan logika kapitalisme global yang

didorong oleh akumulasi profit dan hegemoni aktor-aktor kuat (Soe'od, 2024). Melalui lensa EPI Kritis, kasus ini menunjukkan struktur ketergantungan (*dependency theory*), di mana sumber daya Papua diekstraksi untuk kepentingan ekonomi global, sementara masyarakat adat khususnya perempuan Amungme menghadapi dislokasi sosial, kemiskinan, dan pelanggaran HAM. Negara Indonesia, alih-alih menjadi pelindung kedaulatan rakyat, justru berperan sebagai fasilitator kapital melalui kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan militarisasi kawasan tambang, yang memperkuat ketimpangan struktural (Pamungkas et al., 2022).

EPI Kritis juga mengungkap kegagalan mekanisme HAM internasional seperti UNDRIP (2007) dan Konvensi CEDAW dalam mengikat korporasi multinasional, sementara lembaga seperti Bank Dunia dan ASEAN abai terhadap dampak sosial-ekologis karena tunduk pada logika pasar neoliberal. Namun, teori ini tidak hanya berfokus pada dominasi, tetapi juga membuka ruang untuk menganalisis resistensi sebagai kontra-hegemoni. Perlawan perempuan Amungme, melalui strategi *boomerang effect* (Keck & Sikkink, 1998), menunjukkan bagaimana aktor lokal memanfaatkan tekanan internasional (misalnya melalui aliansi dengan NGO global atau advokasi di PBB) untuk menantang kekuasaan korporasi dan negara.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini merumuskan tiga dimensi analisis utama yang saling berkaitan. Pertama, dimensi struktur kapitalisme global, yang berfokus pada bagaimana kebijakan ekstraktif seperti izin tambang, kebijakan investasi, dan perjanjian ekonomi terintegrasi dalam rantai nilai global. Analisis ini menelusuri bagaimana Papua ditempatkan sebagai wilayah periferi yang berfungsi sebagai penyedia bahan mentah bagi pusat-pusat kapital global, sementara keuntungan ekonomi mengalir keluar dari wilayah tersebut. Kedua, dimensi aktor, yang menelaah hubungan antara pemerintah, korporasi multinasional, dan masyarakat adat. Di sini, penelitian menyoroti peran negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator akumulasi kapital melalui kebijakan yang memihak kepentingan korporasi. Relasi ini memperlihatkan bentuk “kolusi struktural” antara negara dan modal yang mengorbankan hak-hak masyarakat adat. Ketiga, dimensi relasi kuasa dan imperialisme ekologis, yang menyingkap bagaimana eksloitasi sumber daya alam di Papua bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga bentuk kolonialisme baru yang menundukkan alam dan tubuh manusia khususnya tubuh perempuan dalam logika akumulasi kapital.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengombinasikan data dari dokumen kebijakan, laporan

investigatif LSM, serta pemberitaan media. Pendekatan ini membantu mengungkap kesenjangan antara wacana resmi pembangunan dengan realitas sosial-ekologis yang dialami masyarakat di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif lokal melalui suara dan pengalaman perempuan Amungme, yang sering kali terpinggirkan dalam narasi dominan tentang “pembangunan”.

Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik kapitalisme ekstraktif di Papua menghasilkan ketimpangan sosial-ekologis yang mendalam mulai dari pencaplokatan tanah adat, perusakan lingkungan, hingga disrupti terhadap tatanan sosial dan kultural masyarakat Amungme. Namun di balik situasi penindasan tersebut, penelitian ini juga menemukan bentuk-bentuk perlawanan yang muncul dari akar rumput, terutama yang digerakkan oleh perempuan Amungme. Mereka memaknai perlawanan bukan hanya sebagai upaya mempertahankan kehidupan, tetapi juga sebagai tindakan politik yang menantang logika kapitalisme dan patriarki. Perempuan Amungme dengan demikian berperan sebagai agen kontra-hegemoni, yang melalui aksi kolektif, ritual adat, dan narasi ekologisnya, menegaskan alternatif terhadap sistem ekonomi yang menindas.

Pada akhirnya, penelitian ini tidak berhenti pada kritik terhadap ketidakadilan struktural yang direproduksi oleh sistem kapitalisme global, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual bagi perlawanan dan transformasi sosial. Dengan mengintegrasikan teori EPI kritis dan perspektif feminis, studi ini menegaskan pentingnya melihat Papua bukan sebagai “wilayah sumber daya”, melainkan sebagai ruang perjuangan yang menampilkan potensi resistensi dan solidaritas transnasional. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada wacana akademik mengenai kapitalisme ekstraktif dan perlawanan lokal-global, sekaligus memperluas pemahaman tentang bagaimana perempuan adat memainkan peran strategis dalam perjuangan melawan ketidakadilan global.

## PEMBAHASAN

Eksplorasi sumber daya alam di Tanah Papua tidak dapat dipahami secara parsial. Proses ini harus dianalisis sebagai manifestasi dari logika kapitalisme global, yang bekerja melalui jaringan kekuasaan kolaboratif antara korporasi multinasional, negara maju, dan lembaga keuangan internasional. Ketiganya membentuk struktur ketergantungan yang memungkinkan eksplorasi sistematis terhadap wilayah pinggiran seperti Papua. Dalam kerangka Ekonomi Politik Internasional (EPI) kritis, kasus Papua mengungkapkan bagaimana mekanisme akumulasi kapital tidak hanya menghasilkan marjinalisasi sistemik terhadap

masyarakat adat, tetapi juga secara langsung membebani perempuan Amungme melalui penghancuran ruang hidup, kekerasan struktural, dan erosi peran mereka sebagai penjaga ekologi.

Pembahasan ini mengurai tiga dimensi krisis utama: (1) mekanisme akumulasi kapital melalui eksplorasi sumber daya; (2) dampak sosial-ekologis yang timpang dan dimensi gender; serta (3) narasi perlawanan perempuan Amungme terhadap kapitalisme ekstraktif.

### **Mekanisme Akumulasi Kapital melalui Eksplorasi Sumber Daya**

Sistem kapitalisme global secara struktural mengonstruksi wilayah pinggiran seperti Papua sebagai sumber utama komoditas mentah seperti emas, gas alam, dan tembaga yang diperlukan untuk menopang siklus akumulasi modal di negara-negara pusat (global North). Papua tidak hanya dimaknai sebagai wilayah teritorial, dan juga disebut sebagai periphery of extraction, di mana keberadaannya dikonstruksi oleh kepentingan eksternal yg dapat dilihat pada **Tabel 1.3** (Lantang & Tambunan, 2020).

**Tabel 1.2** Dikonstruksi oleh Kepentingan Eksternal

Tahun	Aspek	Bukti & Aktor Eksternal	Dampak bagi Papua
<b>1967-Sekarang</b>	Pertambangan	Kontrak karya Freeport (AS, korporasi multinasional)	Eksplorasi emas & tembaga; marginalisasi adat
<b>2001-Sekarang</b>	Kebijakan Negara	Otonomi Khusus (Pemerintah Indonesia, lembaga donor)	Ketergantungan fiskal; kontrol lokal terbatas
<b>2015-sekarang</b>	Infrastruktur	Proyek jalan & pelabuhan (Pemerintah, korporasi)	Perubahan ekologi; akses terbatas
<b>1945/1960/2000- Sekarang</b>	Ekonomi Global	Fluktuasi harga komoditas (pasar internasional)	Papua sebagai periphery of extraction

Dalam logika ini, tanah, air, dan tubuh masyarakat adat direduksi menjadi objek produksi ekonomi. Perusahaan multinasional seperti Freeport McMoRan dan BP Tangguh tampil sebagai aktor dominan dalam proses ini, didukung oleh struktur kekuasaan global dan nasional yang saling menopang. Keberadaan mereka tidak lepas dari kebijakan ekonomi internasional dan perjanjian investasi yang dibentuk oleh institusi finansial global seperti Bank

Dunia, IMF, maupun perjanjian bilateral yang memprioritaskan liberalisasi pasar atas perlindungan hak-hak lokal.

Kekuasaan kapital tidak berdiri sendiri, tetapi bertumpu pada dukungan negara. Di tingkat nasional, akumulasi kapital dilegitimasi melalui instrumen hukum seperti UU Minerba, UU Penanaman Modal, dan regulasi Otonomi Khusus Papua yang, alih-alih melindungi masyarakat adat, justru memperkuat dominasi korporasi dan memperdalam ketimpangan struktural. Negara tampil sebagai *regulatory state* yang berfungsi untuk membuka ruang bagi penetrasi modal asing, bukan sebagai entitas pelindung warganya Proyek investasi berskala besar diberi kemudahan izin, perlindungan hukum, dan insentif fiskal, sementara masyarakat adat yang terdampak tidak dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan. Dengan demikian, proses akumulasi berjalan dalam koridor legal yang secara sistematis menyingkirkan masyarakat adat dari tanahnya sebuah praktik yang dalam teori David Harvey disebut sebagai *accumulation by dispossession* (Uksan & Widodo, 2023).

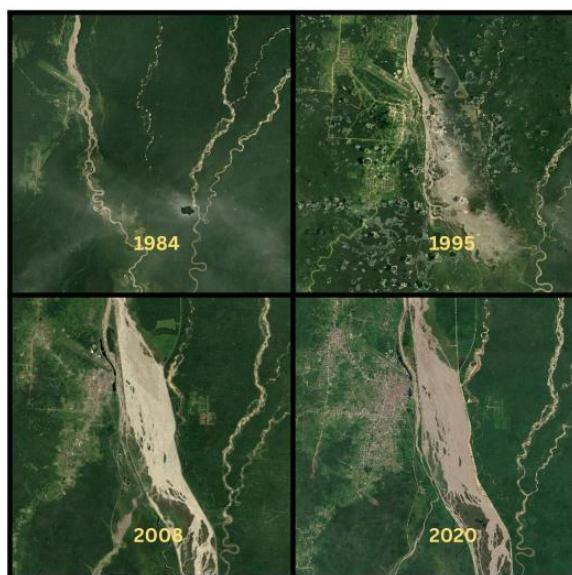
Proses eksklusi masyarakat adat dari ruang hidupnya berlangsung melalui berbagai cara dari manipulasi izin penggunaan tanah, pembuatan peta sepihak, hingga pelibatan aparat keamanan sebagai alat represi terhadap warga yang menolak. Komunitas kehilangan akses atas tanah, hutan, dan air, yang merupakan fondasi ekonomi subsisten dan identitas kultural mereka. Tanpa proses *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), relokasi dilakukan secara sepihak. Akibatnya, terjadi dislokasi sosial yang masif komunitas tercerabut dari siklus ekonomi tradisionalnya dan didorong masuk ke dalam relasi kerja upahan yang eksloitatif. Model pembangunan seperti ini bukan hanya menghancurkan sistem penghidupan lokal, tetapi juga memaksakan homogenisasi nilai dan praktik hidup kapitalistik yang asing bagi masyarakat adat. (Yayusman & Pamungkas, 2023).

Infrastruktur fisik yang dibangun melalui proyek-proyek ekstraktif pun bersifat eksklusif dan fungsional terhadap kepentingan kapital. Jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik dibangun bukan untuk meningkatkan mobilitas sosial atau pelayanan publik, melainkan untuk memastikan efisiensi logistik dari lokasi ekstraksi ke pasar global. Tidak jarang, warga yang tinggal berdekatan dengan tambang justru tidak mendapatkan akses listrik atau air bersih (Dewi, 2024). Hal ini mencerminkan logika pembangunan kapitalistik yang mengutamakan produktivitas dan profitabilitas, bukan keadilan sosial atau keberlanjutan ekologis. Dengan demikian, infrastruktur menjadi instrumen penguatan struktur eksklusi, bukan sarana pembebasan.

Dalam kerangka yang lebih luas, kondisi ini menunjukkan bahwa Papua telah dijadikan zona pengorbanan (*sacrifice zone*) wilayah yang secara sistematis dimiskinkan, dirusak, dan dijauhkan dari kendali atas sumber dayanya sendiri demi kepentingan akumulasi kapital global. Ekstraksi sumber daya tidak hanya memproduksi surplus ekonomi, tetapi juga memperdalam ketimpangan global dan domestik. Mekanisme ini bekerja melalui kombinasi antara kekuasaan ekonomi, legalitas formal, kooptasi lokal, dan represi militer yang seluruhnya terbungkus dalam narasi pembangunan dan nasionalisme (Wahyuningtyas, 2024). Dalam konteks ini, perlawanan masyarakat adat dan terutama perempuan adat menjadi penting, bukan hanya sebagai bentuk perjuangan ekologis, tetapi juga sebagai upaya merebut kembali kedaulatan atas tanah, tubuh, dan masa depan mereka.

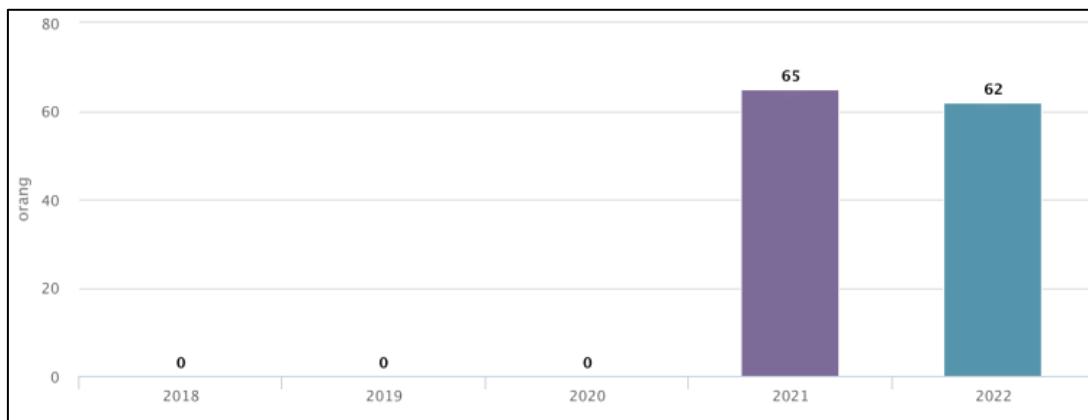
### **Dampak Sosial-Ekologis yang Timpang dan Dimensi Gender**

Ketika tanah adat, hutan, dan sungai yang merupakan fondasi ekonomi dan spiritual masyarakat Papua dirampas, maka yang terdampak pertama dan paling berat adalah perempuan. Dalam budaya Amungme dan banyak masyarakat adat lainnya, perempuan berperan sebagai penjaga keseimbangan ekologis dan pengelola sumber daya domestik. Kehilangan akses atas lahan berarti kehilangan kemandirian ekonomi, hilangnya pangan lokal, serta naiknya beban kerja reproduktif (Nurinaya & Siswatiningsrum, 2025). Hasil dari proses Panjang eksploitasi sumber daya mengakibatkan dampak ekologis dan perumahan lahan yang dapat dilihat pada **Gambar 1.2**



**Gambar 1.2** Perluasan Sungai.  
Sumber: Citra Satelit Google Earth

Perluasan sungai akibat aktivitas tambang yang divisualisasikan melalui **Gambar 1.2** telah mengubah kondisi sosial-ekologis di wilayah Mimika, disertai dengan meningkatnya pencemaran. Ketika sungai tercemar oleh limbah tailing dari tambang, perempuan Amungme tidak hanya kehilangan air untuk memasak dan mencuci, tetapi juga kehilangan sumber ikan dan tumbuhan air yang menopang dapur mereka. Ketika hutan digunduli, mereka kehilangan akses atas sagu, bahan obat-obatan tradisional, serta tanaman pangan lainnya. Akibatnya, perempuan terpaksa berjalan lebih jauh, bekerja lebih keras, dan menghabiskan lebih banyak waktu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ketimpangan ini tidak hanya terjadi di level ekonomi. Proyek ekstraktif membawa arus migrasi laki-laki dari luar wilayah, baik sebagai pekerja maupun aparat keamanan. Migrasi ini menciptakan ketegangan horizontal, serta membuka celah baru bagi praktik kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual (Untari, 2022). Kasus kekerasan terhadap perempuan adat meningkat. Sepanjang tahun 2022, terdapat 58 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Mimika. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2022 paling banyak terjadi di Distrik Mimika Baru dengan persentase sebesar 55,17% atau sebanyak 32 kasus (Satu Data Mimika, 2023), namun banyak yang tidak dilaporkan karena korban takut, tidak mendapat akses keadilan, dan khawatir distigma oleh masyarakat, grafik kekerasan pada perempuan di mimika dapat dilihat pada **Gambar 1.3**.



**Gambar 1.3** Grafik kekerasan terhadap perempuan 2018-2022

Sumber: Website Satu data Mimika

Pada periode 2018–2020 dapat dilihat pada grafik, terdapat indikasi kuat mengenai ketiadaan pelaporan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang menimbulkan pertanyaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat, Lensa EPI feminis

memberikan perhatian khusus pada bagaimana sistem kapitalisme global tidak netral terhadap gender. Lensa EPI feminis justru beroperasi di atas kerja-kerja perempuan yang tidak dibayar (kerja reproduktif), meminggirkan suara perempuan dalam pengambilan kebijakan, dan memperparah ketidakadilan yang telah ada. Dalam konteks Papua, perempuan menjadi korban berlapis: korban ekologis, korban ekonomi, dan korban kekerasan struktural. Bahkan dari aspek kesehatan, dampak ini juga sangat dirasakan, anak-anak lahir dengan cacat, ibu menderita penyakit kulit akibat air tercemar, dan akses ke layanan kesehatan sangat terbatas. Perempuan, yang sering menjadi perawat utama dalam keluarga, harus menanggung beban perawatan dalam situasi sumber daya yang minim. Ini menjadikan eksloitasi sumber daya bukan sekadar persoalan ekonomi atau ekologi, tetapi juga krisis kemanusiaan berbasis gender.

### **Politik Ekologis Feminis dan Resistensi terhadap Kapitalisme Ekstraktif di Papua**

Dalam kerangka Ekonomi Politik Internasional (EPI) kritis, kapitalisme ekstraktif yang beroperasi di Papua dapat dibaca sebagai manifestasi paling telanjang dari logika akumulasi global. Ia menyingkap bagaimana kapital tidak hanya mengekspansi pasar dan tenaga kerja, tetapi juga mereorganisasi ruang hidup, identitas, dan relasi sosial masyarakat lokal. Papua, yang kaya akan sumber daya alam seperti tembaga dan emas, menjadi ruang di mana kekuasaan ekonomi global bertemu dengan kekerasan kolonial dan patriarkal. Dalam konteks ini, tubuh perempuan dan tubuh tanah menjadi dua entitas yang paling terdampak sekaligus menjadi medan utama perlawanan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Nancy Fraser (2014), kapitalisme modern selalu membawa “krisis ganda”: krisis akumulasi dan krisis reproduksi sosial. Krisis akumulasi muncul ketika kapital terus mencari cara untuk mengekstraksi nilai lebih dari tenaga kerja dan alam, sementara krisis reproduksi sosial terjadi karena sistem ini menghancurkan fondasi kehidupan termasuk kerja perawatan, komunitas, dan lingkungan yang justru menopang keberlanjutan ekonomi itu sendiri. Dalam konteks Papua, ekspansi tambang PT Freeport Indonesia menunjukkan secara konkret kontradiksi tersebut: demi akumulasi global, tanah ulayat dihancurkan, sungai tercemar limbah tailing, dan perempuan adat kehilangan ruang reproduksi sosial mereka. Perempuan Amungme, yang sebelumnya menjadi penjaga siklus ekologis dan spiritual melalui sistem adat Igya Ser Hanjob, kini dipaksa masuk dalam relasi produksi kapitalistik sebagai buruh murah atau pekerja informal di sekitar tambang.

Maria Mies (1986) dalam *Patriarchy and Accumulation on a World Scale* menegaskan bahwa kapitalisme tidak pernah bekerja sendirian ia selalu beroperasi dalam simbiosis dengan

patriarki dan kolonialisme. Ia menyebut perempuan dan alam sebagai “koloni internal” yang menjadi sumber akumulasi tersembunyi bagi sistem dunia. Perspektif ini sangat relevan untuk membaca pengalaman perempuan Amungme: eksplorasi terhadap tanah mereka berjalan seiring dengan subordinasi terhadap tubuh dan suara perempuan. Kekerasan berbasis gender, yang sering kali dilakukan oleh aparat militer di sekitar area tambang, bukanlah insiden terpisah, melainkan bagian dari infrastruktur kekuasaan yang menopang ekstraktivisme itu sendiri. Dengan kata lain, kapitalisme ekstraktif di Papua adalah proyek politik-ekonomi yang juga berbasis pada kekerasan patriarkal dan kolonial.

Di tengah struktur kekuasaan yang menindas, perempuan Amungme tidak hanya menjadi korban. Mereka membangun apa yang dapat disebut “politik ekologis feminis”, yaitu bentuk perlawanan yang menggabungkan dimensi ekologi, gender, dan dekolonialitas. Perlawanan ini tidak selalu tampil dalam bentuk demonstrasi atau wacana politik formal, tetapi sering berakar pada praktik kehidupan sehari-hari. Tindakan seperti menanam kembali sagu di tanah yang terdegradasi, menjaga ritual adat, atau mengajarkan generasi muda tentang makna hutan adalah strategi resistensi yang menolak logika komodifikasi kapital. Di sinilah relevansi pemikiran Arturo Escobar (2018) tentang *territories of difference* gagasan bahwa komunitas adat menciptakan ruang alternatif yang menolak proyek modernitas kapitalistik dengan mempertahankan epistemologi dan kosmologi mereka sendiri.

Bagi perempuan Amungme, tanah bukanlah sekadar “aset ekonomi” sebagaimana dipahami dalam logika kapitalisme, melainkan entitas hidup yang memiliki hubungan spiritual dan genealogis dengan manusia. Relasi ini sejalan dengan gagasan Val Plumwood (1993) tentang *ecological feminism*, yang menolak dikotomi antara manusia dan alam, serta menunjukkan bahwa subordinasi terhadap alam dan perempuan berasal dari logika dominasi yang sama. Dalam konteks Papua, perlawanan perempuan terhadap penambangan bukan semata-mata penolakan ekonomi, melainkan penegasan kembali etika relasional terhadap bumi sebagai sumber kehidupan dan identitas kolektif.

Perlawanan ini juga dapat dibaca melalui lensa Anna Tsing (2015) dalam *The Mushroom at the End of the World*, yang menggambarkan bagaimana komunitas di wilayah “reruntuhan kapitalisme” menciptakan bentuk-bentuk kehidupan yang resilien dan kreatif. Di tengah kehancuran ekologis akibat tambang, perempuan Amungme mengembangkan seni bertahan hidup *arts of living on a damaged planet* yang mencakup kerja-kerja reproduksi ekologis dan sosial di luar logika pasar. Mereka menciptakan ruang alternatif di mana nilai-nilai solidaritas, keberlanjutan, dan spiritualitas mengantikan nilai akumulasi.

Dalam tataran global, perlawanan perempuan Amungme juga menunjukkan pergeseran posisi dari “objek pembangunan” menjadi *subjek politik transnasional*. Melalui jaringan advokasi internasional, seperti forum HAM PBB atau organisasi solidaritas global, mereka mengartikulasikan pengalaman lokal dalam bahasa universal keadilan ekologis dan gender. Ketika Mama Yosepha berbicara di forum internasional dan menyatakan, “Kami mungkin kecil di mata Freeport, tapi kami punya hak untuk bersuara,” ia sedang melakukan apa yang disebut Fraser sebagai “*repoliticization of needs*” menolak definisi kebutuhan yang ditentukan oleh kapitalisme global, dan menegaskan klaim moral serta politik dari komunitas adat atas tanah dan kehidupan mereka.

Perlawanan perempuan Amungme dapat dipahami sebagai bentuk “*counter-hegemonic struggle*” dalam tradisi Gramscian yang diadopsi oleh EPI kritis. Mereka menantang hegemoni kapitalisme global bukan hanya dengan menolak proyek tambang, tetapi juga dengan mempertahankan sistem pengetahuan alternatif yang berakar pada kosmologi adat. Dalam epistemologi feminis-dekolonial ini, tanah dan tubuh bukan objek pasif, melainkan situs pengetahuan, perlawanan, dan keberlanjutan.

Perjuangan perempuan Amungme juga menyingkap keterbatasan paradigma pembangunan yang dominan di EPI arus utama. Jika teori ekonomi global sering kali berfokus pada perdagangan, investasi, dan pertumbuhan, maka pengalaman perempuan Papua mengingatkan bahwa ekonomi global juga adalah ekonomi tubuh, perawatan, dan alam. Kapitalisme global bertahan bukan hanya melalui pasar dan perusahaan multinasional, tetapi juga melalui kerja tak terlihat perempuan yang mempertahankan kehidupan di tengah kehancuran. Dengan demikian, resistensi mereka memperluas cakrawala EPI feminis dari analisis ekonomi menuju pembebasan ekologis dan epistemologis.

Kisah perempuan Amungme adalah kisah tentang keberanian mempertahankan kehidupan di tengah reruntuhan kapitalisme ekstraktif. Dalam dunia yang kian ditentukan oleh logika perampasan dan nilai tukar, mereka mengajarkan alternatif etika politik: bahwa keberlanjutan sejati lahir dari relasi saling jaga antara manusia dan alam. Perlawanan ini bukan hanya perjuangan lokal, tetapi juga pesan universal tentang keadilan, martabat, dan kemungkinan dunia yang lain dunia di mana tanah dan tubuh tidak lagi dijadikan komoditas, melainkan dihormati sebagai sumber kehidupan bersama.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kapitalisme ekstraktif di Papua bukan hanya sebuah proses ekonomi yang berorientasi pada akumulasi modal, tetapi juga sebuah proyek politik dan ideologis yang melanggengkan kolonialisme dalam bentuk baru. Melalui penetrasi korporasi multinasional seperti Freeport-McMoRan, dukungan kebijakan negara, serta keterlibatan lembaga keuangan global, eksplorasi sumber daya di tanah Amungme menjadi manifestasi dari apa yang disebut *neokolonialisme ekstraktif* di mana kontrol atas sumber daya, tenaga kerja, dan ruang hidup masyarakat adat dialihkan kepada kekuatan eksternal. Dalam konteks ini, perempuan Amungme berada di persimpangan antara perampasan ekonomi, marginalisasi sosial, dan kekerasan gender yang saling berkelindan. Namun, alih-alih menjadi korban pasif, mereka memunculkan bentuk-bentuk perlawanan yang kompleks, terstruktur, dan politis.

Melalui lensa Ekonomi Politik Internasional (EPI) kritis, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme global bekerja melalui hierarki kekuasaan yang tidak netral. Negara berperan sebagai fasilitator bagi modal global, sementara lembaga keuangan internasional berfungsi sebagai pengatur ideologis melalui retorika pembangunan, modernisasi, dan investasi. Papua, dalam hal ini, dijadikan arena produksi dan ekstraksi yang disusun berdasarkan logika akumulasi tanpa batas. Pendekatan feminis terhadap EPI memperlihatkan bahwa dimensi gender seringkali diabaikan dalam analisis ekonomi global. Padahal, perempuan khususnya perempuan adat seperti Amungme menanggung beban paling berat dari proses tersebut. Mereka kehilangan tanah yang menjadi basis reproduksi sosial, menghadapi kekerasan seksual dari aparat keamanan yang melindungi korporasi, dan terpaksa mengemban tanggung jawab ganda: mempertahankan kehidupan di tengah kehancuran ekologis sekaligus melawan struktur penindasan yang bersifat sistemik.

Perlawanan perempuan Amungme harus dipahami sebagai bentuk *politik ekologis* yang melampaui tindakan protes biasa. Mereka menggunakan tubuh, budaya, dan spiritualitas sebagai medan perlawanan terhadap kapitalisme ekstraktif yang memisahkan manusia dari alam. Aksi mereka dalam menjaga tanah adat bukan semata tindakan simbolik, tetapi sebuah proyek dekolonial yang menolak relasi hierarkis antara manusia dan alam sebagaimana dikonstruksikan oleh kapitalisme modern. Dalam konteks ini, tanah tidak hanya dilihat sebagai komoditas ekonomi, melainkan sebagai entitas hidup yang memiliki dimensi spiritual, genealogis, dan identitas kolektif. Dengan demikian, perjuangan perempuan Amungme tidak bisa dipisahkan dari upaya mempertahankan kedaulatan atas tubuh, komunitas, dan kosmologi mereka sendiri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa resistensi perempuan Amungme berkembang melalui jaringan yang bersifat lokal dan transnasional. Di tingkat lokal, mereka membangun solidaritas antarperempuan lintas suku dan agama, memperkuat kembali nilai-nilai adat yang menekankan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap alam. Di tingkat nasional dan global, mereka menjalin hubungan dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga HAM, serta jaringan feminis dan lingkungan internasional. Melalui strategi ini, perlawanan mereka memperoleh ruang artikulasi yang lebih luas dan mampu menantang narasi hegemonik pembangunan yang kerap digunakan negara untuk membenarkan eksplorasi. Dengan demikian, mereka berhasil mentransformasikan perjuangan lokal menjadi bagian dari wacana global tentang keadilan ekologis dan gender.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas cakrawala EPI kritis dengan menempatkan pengalaman perempuan adat sebagai subjek pengetahuan, bukan sekadar objek analisis. Pendekatan feminis terhadap EPI mengungkap bahwa relasi ekonomi-politik global tidak dapat dipahami tanpa memperhitungkan dimensi gender, tubuh, dan ruang hidup. Perlawanan perempuan Amungme memperlihatkan bahwa ekonomi global dibangun di atas kerja-kerja reproduktif yang tak terlihat baik dalam bentuk kerja domestik, perawatan, maupun pemeliharaan ekologis yang secara historis dilekatkan pada tubuh perempuan dan komunitas adat. Ketika kapitalisme ekstraktif menghancurkan tanah dan sumber kehidupan, ia sekaligus menghancurkan basis material dari kerja-kerja tersebut. Oleh karena itu, perjuangan perempuan Amungme merupakan bentuk *counter-hegemony* yang mengganggu tatanan ekonomi-politik global dari fondasinya.

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki signifikansi praktis. Ia mengingatkan bahwa upaya penyelesaian konflik sumber daya di Papua tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan ekonomi atau keamanan, melainkan harus melibatkan keadilan ekologis dan gender sebagai prinsip utama. Pengakuan terhadap hak perempuan adat atas tanah, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan terhadap tubuh dan ruang hidup mereka merupakan prasyarat bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, kebijakan pembangunan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal menjadi penting, bukan hanya untuk mengoreksi ketimpangan, tetapi juga untuk memulihkan relasi yang adil antara manusia dan alam.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa perjuangan perempuan Amungme merepresentasikan perlawanan terhadap logika kapitalisme ekstraktif yang eksploratif, patriarkal, dan kolonial. Mereka menolak dikonstruksikan sebagai penerima pasif dari proyek

pembangunan, dan sebaliknya, menegaskan diri sebagai agen politik yang berdaulat atas tubuh dan tanah mereka. Dalam dunia yang semakin didominasi oleh kekuatan pasar dan modal, suara dan praktik perempuan Amungme menjadi pengingat bahwa ada cara lain untuk hidup, memproduksi, dan berelasi dengan alam cara yang berakar pada kearifan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini menutup dengan refleksi bahwa keadilan ekologis dan gender bukanlah tambahan dalam analisis ekonomi politik internasional, melainkan fondasi untuk memahami dan membongkar struktur ketimpangan global itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwinata, A. (2025). ... Indonesia in Online News: Norman Fairlough's Description Approach: Analisis Wacana Kritis Internasionalisasi Bahasa Indonesia dalam Berita Daring: Pendekatan .... *Journal of Literature and Education*. <https://jurnal.hiskikaltim.org/index.php/jle/article/view/142>
- Ahmed, N., & Cann, E. (2021). Road to injustice: Ecological impunity and resistance in West Papua. ... *Companion to Contemporary Art, Visual Culture* .... <https://doi.org/10.4324/9780429321108-8>
- Badiri, I. (2020). Analisis Ekonomi Politik Internasional Dalam Studi Kasus Perang Dagang Amerika Serikat–Tiongkok Periode 2018-2019. *Padjadjaran Journal of International Relations*. <https://jurnal.unpad.ac.id/padjir/article/view/26070>
- Chao, S. (2022). Gastrocolonialism: the intersections of race, food, and development in West Papua. *The International Journal of Human Rights*. <https://doi.org/10.1080/13642987.2021.1968378>
- Dewi, R. (2024). The paradox of Papuan recognition after two decades of special autonomy: Racism, violence, and self-determination. *Advances in Southeast Asian Studies*. <https://aseas.univie.ac.at/index.php/aseas/article/view/6332>
- Ercan, S. A., & Vromen, A. (2023). Qualitative research in political science. ... *Qualitative Research in Social Science*. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/book/9781800376199/book-part-9781800376199-13.xml>
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses negosiasi konflik papua: dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/27056>

- Lantang, F., & Tambunan, E. (2020). The internationalization of "West Papua" issue and its impact on Indonesia's policy to the South Pacific region. *Journal of ASEAN Studies*. <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/69621>
- Nurinaya, N., & Siswatiningsrum, E. (2025). Signifikansi Peran Perempuan Adat Papua Dalam Upaya Iklim Berkelanjutan. *JOSH: Journal of Sharia*. <https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/josh/article/view/1894>
- Pamungkas, C., Oktafiani, I., & ... (2022). Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan* ....<https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnallIlmiahHubunganInternasional/article/view/5970>
- Pecamuya, R. (2025). Transformasi Tata Kelola Masyarakat Adat: Ketahanan Komunitas dalam Menghadapi MIFEE dan Kebijakan Konservasi di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <http://indojurnal.com/index.php/jejakdigital/article/view/367>
- Soe'od, D. V. (2024). Analisis Kebijakan Ekstraktivisme Sumber Daya Alam: Studi Kasus Freeport Dan Ketimpangan Ekonomi Di Papua. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/1712>
- Uksan, A., & Widodo, P. (2023). Menilik Politisasi Konflik Papua: Dilema Isu Keamanan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4759>
- Untari, U. (2022). *Model Adaptasi Unsur Budaya Pada Keberlanjutan Kesejahteraan Nelayan Pesisir Di Merauke= Adaptation Model Of Cultural* .... repository.unhas.ac.id. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17879/>
- Wahyuningtyas, E. M. (2024). The Illusion of Papuan Independence through Benny Wenda's Transnational Advocacy Network Strategy during the# FreeWestPapua Campaign in 2020. *Journal Research of Social Science* .... [https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&auth\\_type=crawler&jrnl=28076494&AN=177788816&h=t4tOcvWmFxLTcT1nXRI0KJyldrRcQiPb4YRoQnjep0tusVABaHV%2B44euSEE0meam1L0F23XlngF6jBOGepZM Lg%3D%3D&crl=c](https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&auth_type=crawler&jrnl=28076494&AN=177788816&h=t4tOcvWmFxLTcT1nXRI0KJyldrRcQiPb4YRoQnjep0tusVABaHV%2B44euSEE0meam1L0F23XlngF6jBOGepZM Lg%3D%3D&crl=c)
- Yansyah, M. F., Triatmojo, M. K., & ... (2022). Urgensi Penilaian Pemerintah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Ulayat Di Papua. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial* .... <https://melatijournal.com/index.php/jisma/article/view/252>

Yayusman, M. S., & Pamungkas, C. (2023). Papuan Voices: Digital Media Usage for Peacebuilding. *Journal of Peacebuilding* & ....  
<https://doi.org/10.1177/15423166231201125>